



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN WISATA
PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019-2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa maju, perlu dilakukan pembinaan dalam suatu bentuk pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi beberapa desa dengan wilayah berdekatan dan saling memiliki keterkaitan alami dengan karakter dan potensi sumber daya yang memiliki banyak kesamaan dan homogen;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu untuk menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Padang Batung Hulu Sungai Selatan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN WISATA PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah di Daerah.
6. Pariwisata/wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah baik desa, daerah provinsi maupun pusat.
7. Zona adalah adalah area di dalam kawasan perdesaan dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai peruntukan.
8. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri dan sebagainya.
9. Kawasan Perdesaan adalah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.

- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

BAB III LINGKUP PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Baru direncanakan berada di Kecamatan Padang Batung, terdiri dari 7 (tujuh) desa yang memiliki potensi wisata dan interkoneksi tinggi yaitu :
- a. Desa Madang;
 - b. Desa Batu Bini;
 - c. Desa Mawangi;
 - d. Desa Batu Laki;
 - e. Desa Malilingin;
 - f. Desa Pahampangan; dan
 - g. Desa Malutu.
- (2) Pusat kegiatan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Padang Batung ditetapkan berada di Desa Madang.

BAB IV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN WISATA PADANG BATUNG

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :
- Bab. I : Pendahuluan
Bab. II : Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan
Bab. III : Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan
Bab. IV : Klaster dan Sasaran Kawasan
Bab. V : Model Sinerginitas Pembangunan Kawasan
Bab. IV : Matriks Program dan Kegiatan
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Padang Batung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
HUBRIANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN WISATA PADANG BATUNG KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019-2023

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) KAWASAN WISATA
PADANG BATUNG TAHUN 2019-2023

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan
 - 1.3 Landasan Hukum
- BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN
- 2.1 Fisik Dasar
 - 2.2 Sosial Budaya dan Kependudukan
 - 2.3 Ekonomi
 - 2.4 Sarana dan Prasarana
- BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN
- 3.1 Delineasi kawasan
 - 3.2 Susunan Fungsi Kawasan
- BAB IV KLAS TER DAN SASARAN KLAS TER
- 4.1 Klaster Komoditas
 - 4.2 Klaster Pendukung
- BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN
- 5.1 Analisis klater
 - 5.2 Kerangka Sistem
- BAB VI MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN
- LAMPIRAN - LAMPIRAN
- 1. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan
 - 2. Surat Penetapan Kawasan Perdesaan
 - 3. Surat Penetapan TKPKP Kawasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urgensi pembangunan desa dan kawasan perdesaan seperti yang diamanatkan dalam NAWACITA, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan kota-desa yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Untuk itu, target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2015-2019 adalah mengurangi 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan sedikitnya 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai aturan peraturan pelaksanaannya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan turunan lainnya. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 83, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Untuk melaksanakan amanat ini, maka perlu disusun Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten/kota/desa di masa mendatang (RPJM Daerah dan RPJMDesa) dan RTRW Kabupaten/Kota. Proses tersebut merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap desa dan Kawasan Perdesaan.

Penyusunan rancangan RPKP tersebut dilakukan melalui pendekatan rencana yang disusun menjadi menyeluruh, terpadu dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Selanjutnya rancangan RPKP tersebut diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten sebagai bahan pengusulan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi RPKP. RPKP ini akan menjadi acuan dalam menyusun program aksi tahunan berikutnya bagi seluruh SKPD terkait dalam menyusun rencana teknis yang lebih detail (*detail engineering design/DED*) maupun bisnis plan sesuai komoditi yang akan dikembangkan. RPKP ini sekaligus akan menjadi landasan kerja bagi pelaksana kegiatan unit kerja lain Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan khususnya, dan umumnya bagi unit kerja lain di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian/Lembaga terkait.

1.2. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai bahan masukan bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten untuk diusulkan kepada Bupati menjadi RPKP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- c. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
- d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- i. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- l. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025; dan
- r. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018.

BAB II **DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN**

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, desa-desa dapat digolongkan menjadi desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. IDM diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kawasan Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 7 (tujuh) desa yang mayoritas tergolong sebagai desa tertinggal berdasarkan IDM. Berikut ini merupakan tabel IDM desa-desa di Kawasan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.1
IDM Kawasan Perdesaan
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan	No.	Desa	Nilai IDM	Status
				Tertinggal (0,491 < IDM ≤ 0,599)
Padang Batung	1.	Malutu	0,5154	
	2.	Malilingin	0,5529	
	3.	Batu Laki	0,5431	
	4.	Batu Bini	0,5679	
	5.	Pahampangan	0,5462	
	6.	Mawangi	0,5450	
	7.	Madang	0,5940	

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dengan demikian secara keseluruhan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kawasan Perdesaan belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Kondisi Kawasan Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara lebih jelas dijabarkan dalam sub bab berikut ini yang terdiri dari fisik dasar, kependudukan, ekonomi, serta sarana dan prasarana.

2.1 Fisik Dasar

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Perdesaan

Kawasan Wisata Perdesaan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawasan Perdesaan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) desa yang memiliki kesamaan karakteristik wilayah sebagai lokasi yang mempunyai potensi wisata yang sama dengan letak yang berdampingan satu sama lain. Luas Kawasan Wisata Perdesaan adalah 115,43 Km² atau kurang lebih 6,39% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rincian desa dan beserta luasan kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Desa Tahun 2017
Kawasan Wisata Perdesaan

No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
1	Padang Batung	Malutu	10,00	8,67
2		Malilingin	23,43	20,29
3		Batu Laki	26,50	22,96
4		Batu Bini	20,50	17,75
5		Pahampangan	10,00	8,67
6		Mawangi	15,00	12,99
7		Madang	10,00	8,67
Luas Kawasan			115,43	100
Luas Kab. Hulu Sungai Selatan			1.804,94	6,39

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2017

Kawasan Wisata Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di bagian tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berbatasan langsung dengan Kota Kandangan sebagai ibu kota kabupaten, dengan jarak kurang lebih 6 Km. Kawasan Wisata Perdesaan ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut,

- Utara : Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Telaga Langsung
- Selatan : Kabupaten Tapin
- Timur : Kecamatan Loksado
- Barat : Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Sungai Raya

2.1.2 Topografi Kawasan Perdesaan

Kawasan Wisata Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara administrasi berada di Kecamatan Padang Batung. Berdasarkan topografinya, Kecamatan Padang Batung terdiri dari dataran yang memanjang di wilayah utara secara geografis sebelah utara berbatasan dengan kecamatan angkinang dan kecamatan telaga langsung, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Tapin, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan loksado, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kandangan dan kecamatan sungai raya.

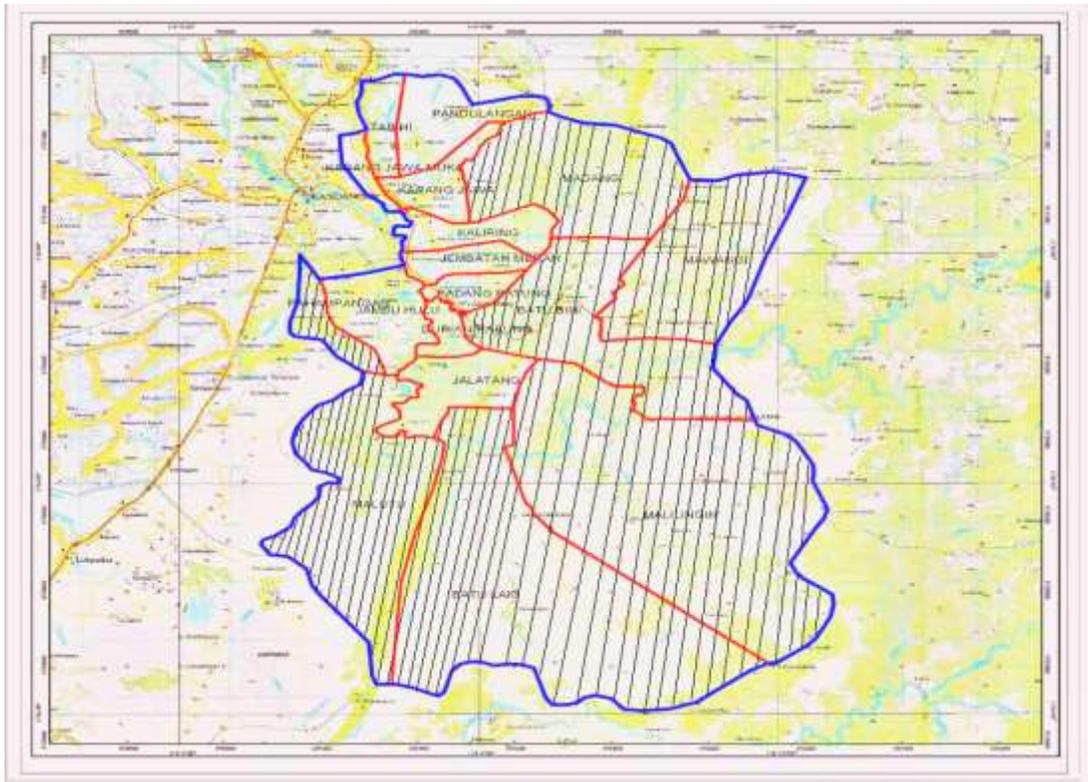
Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2016, hujan paling sering terjadi di bulan januari, februari, april dan oktober dengan 14 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan juni dengan 7 hari hujan.

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan Tahun 2016
di Kecamatan Padang Batung

Bulan	Kecamatan Padang Batung	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	265	14
Februari	334	14
Maret	353	12
April	234	14
Mei	238	10
Juni	183	7
Juli	170	8
Agustus	151	8
September	234	9
Oktober	367	14
November	353	9
Desember	332	11
Rata-rata/bulan	267,84	11

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2017

Sementara itu, berdasarkan peta yang diperoleh didapatkan informasi bahwa kemiringan lereng yang ada di Kawasan Wisata Perdesaan ini berkisar antara 8 – 14,9%. Persentase tersebut termasuk dalam kategori topografi datar. Adapun untuk jenis tanah, kawasan perdesaan ini didominasi oleh tanah organosol. Tanah organosol terbentuk dari pelapukan benda organik seperti seperti daun- daun, bunga- bunga, dahan, batang pohon, dan lain sebagainya. Biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan memiliki curah hujan tinggi. Tanah organosol merupakan jenis tanah yang sangat subur. Oleh karena itulah tanah organosol ini banyak dimanfaatkan untuk pertanian dan juga perkebunan. Gambaran kemiringan lereng dan jenis tanah yang ada di Kawasan Wisata Perdesaan dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.



Gambar 2.1
Peta Kawasan Wisata Perdesaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2018

2.1.3 Penggunaan Lahan

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Oleh karena itu sumberdaya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan tersebut dengan lingkungannya. Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk mempertahankan ketersediaan pangan lokal sebaiknya lahan pertanian yang masih ada dapat lebih dioptimalkan penggunaannya.

2.1.4 Kebencanaan

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang kondisi topografi Kawasan Wisata Perdesaan dapat diketahui bahwa kawasan perdesaan tersebut masuk dalam kategori pegunungan. Walaupun demikian, berdasarkan data Podes 2014, tercatat bahwa belum ada kejadian bencana di Kawasan Wisata Perdesaan yang menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat baik itu kerugian jiwa maupun material.

2.2 Sosial Budaya dan Kependudukan

2.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada Kawasan Wisata Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung terus meningkat dari tahun 2011-2015. Dalam kurun waktu 5 tahun setidaknya tiap desa mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 50 - 100 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut setidaknya dapat memicu peningkatan kebutuhan hidup masyarakat yang berakibat pada munculnya interaksi penduduk antara desa dan kota yang dapat mendorong perkembangan desa.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kawasan Wisata Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebanyak 8.830 jiwa, terdiri dari 4.511 jiwa penduduk laki-laki dan 4.319 jiwa penduduk perempuan. Angka kepadatan penduduk diperoleh melalui perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk di masing-masing desa di Kawasan Wisata Perdesaan di Kabupaten Sungai Hulu Selatan berbeda. Kepadatan penduduk di kawasan pedesaan ini mencapai 155 jiwa/Km² dengan Desa Madang sebagai desa terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 1.147 jiwa/Km². Untuk mengetahui lebih rinci mengenai jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di Kawasan Perdesaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Tahun 2016
Kawasan Wisata Perdesaan

No	Desa	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Malutu	10,00	1.455	146
2	Malilingin	23,43	956	41
3	Batu Laki	26,50	1.233	47
4	Batu Bini	20,50	2.100	102
5	Pahampangan	10,00	845	84
6	Mawangi	15,00	1.094	73
7	Madang	10,00	1.147	115
Total		115,43	8.830	10,706

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2017

2.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk dalam suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah ditentukan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa jumlah penduduk Kawasan Wisata Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016 adalah sebesar 8.830 jiwa dengan laju perumbuhan penduduk tertinggi dari tahun 2015 ke 2016 adalah Desa Mawangi. Sementara itu laju pertumbuhan yang paling

rendah di tahun 2015 - 2016 adalah Desa Malilingin. Perbedaan angka laju pertumbuhan penduduk tiap desa ini dipicu oleh kelahiran, kematian dan migrasi penduduk yang ada di desa tersebut, sehingga apabila penambahan jumlah penduduknya berbeda maka laju pertumbuhan penduduknya juga akan berbeda.

Tabel 2.6
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2015 di Kawasan Wisata Perdesaan

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan Penduduk (%)	
			2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1	Padang Batung	Malutu	1346	1438	1.455	1299	1167
2		Malilingin	885	945	956	1295	1129
3		Batu Laki	1141	1219	1.233	1296	1146
4		Batu Bini	1942	2076	2.100	1302	1171
5		Pahampangan	782	835	845	1301	1185
6		Mawangi	1012	1081	1.094	1304	1194
7		Madang	1061	1133	1.147	1304	1189

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2011-2015

2.2.3 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk menghitung angka perbandingan jenis kelamin (*sex ratio*). Pada Kawasan Wisata Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan angka perbandingan berdasarkan jenis kelamin mencapai angka 95,58%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 di Kawasan Wisata Perdesaan setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95,58 atau 96 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Angka perbandingan jenis kelamin (*sex ratio*) masing-masing desa di Kawasan Wisata Perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Komposisi Penduduk Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kawasan Wisata Perdesaan

No	Kecamatan	Desa	Laki-laki	Perempuan	Sex ratio (%)
1	Padang Batung	Malutu	724	731	99,04
2		Malilingin	501	455	110,11
3		Batu Laki	623	610	102,31
4		Batu Bini	1107	993	111,48
5		Pahampangan	411	434	94,70
6		Mawangi	553	541	102,22
7		Madang	592	555	106,67
Total			4511	4319	726.53

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2017

Berdasarkan komposisi penduduk menurut mata pencaharian diperoleh informasi bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kawasan Wisata

Perdesaan ini bermata pencaharian sebagai petani dan wiraswasta, selain itu ada juga yang bekerja sebagai pedagang, PNS, dan lain sebagainya. Informasi tersebut diperoleh dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Berdasarkan informasi terkait mata pencaharian tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan perdesaan ini masih bergantung pada kegiatan pertanian namun peran aktif sektor industri juga sudah semakin besar.

2.2.4 Sosial Budaya Penduduk

Agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di Kawasan Wisata Perdesaan ini adalah agama Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, semua warga di kawasan masih kental dengan gotong royong. Kegiatan gotong royong yang dilakukan salah satunya ditunjukkan dengan kegiatan perbaikan jalan lingkungan maupun kegiatan bersama lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kerukunan antar warga di kawasan perdesaan ini. Masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan tersebut saling membantu baik dalam pekerjaan fisik seperti memperbaiki jalan juga pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri pariwisata. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini ikatan kekeluargaan atau ketetanggaan antar masyarakat masih tinggi dan terjaga dengan baik.

2.3 Ekonomi

2.3.1 Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pengembangan perekonomian di suatu wilayah. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sektor pertanian juga masih menjadi sektor yang berpengaruh dalam perkembangan perekonomian wilayah maupun kontribusi terhadap PDRB. Komoditas unggulan yang banyak diusahakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pertanian tanaman pangan, terutama padi sawah. Selain itu untuk Kawasan Wisata Perdesaan sektor pertanian juga masih menjadi sektor yang memiliki peran besar. Jenis komoditas yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat yang ada di kawasan perdesaan antara lain adalah padi baik sawah maupun padi ladang, kacang tanah, jagung dan ubi jalar maupun ubi kayu.

2.3.2 Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia, sedangkan mutu serta kualitas sumberdaya manusia ini merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kecukupan sarana pendidikan yang dapat menunjang proses

belajar-mengajar. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memadai merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Pada tahun 2014 sarana prasarana pendidikan yang berada di kawasan wisata perdesaa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat cukup memadai. Sarana pendidikan yang ada di Kawasan Wisata Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada Kawasan Perdesaan tersebut, jumlah sarana TK swasta sebanyak 7 unit, sarana SD sebanyak 14 unit, sedangkan untuk sarana SMP sebanyak 2 unit yang terletak di desa Sungai Raya Utara dan Desa Wasah Hilir. Tidak terdapat sarana pendidikan SMA pada Kawasan Perdesaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana pendidikan SMA dapat didukung dengan sarana pendidikan SMA terdekat yang berada Kecamatan Kandangan. Untuk mengetahui rincian jumlah dan sebaran sarana pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Fasilitas Pendidikan Tahun 2016 Menurut Desa
di Kawasan Wisata Perdesaan

No	Kecamatan	Desa	SD/MI	SMP
1	Padang Batung	Malutu	2	1
2		Malilingin	2	
3		Batu Laki	3	1
4		Batu Bini	3	
5		Pahampangan	1	
6		Mawangi	2	
7		Madang	3	
Total				

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2017

2.3.3 Sarana Kesehatan

Ketersediaan fasilitas atau prasarana kesehatan sangat menunjang dalam kelancaran pelayanan kesehatan. Semakin banyak jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, semakin besar kemungkinan penduduk menikmati pelayanan yang baik, paling tidak dalam ketersediaan pelayanan kesehatan. Fasilitas dan prasarana yang lengkap tentu akan memberi dampak yang positif terhadap perbaikan kesehatan penduduk. Posyandu sendiri saat berjumlah 14 unit dengan rata-rata 2 (dua) unit tiap desanya, sedangkan untuk bidan, saat ini telah ada 1 bidan di setiap desa. Untuk sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas belum tersedia di Kawasan Perdesaan di luar wilayah Kawasan Perdesaan ini. Namun, untuk sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu terdapat di Desa Malutu, Desa Batu Laki, Desa Mawangi dan Desa Madang. Data rinci untuk jumlah dan sebaran sarana kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9

**Jumlah Fasilitas Kesehatan tahun 2016 Menurut Desa
di Kawasan Wisata Perdesaan**

No	Kecamatan	Desa	Pustu	Poskesdes	Posyandu
1	Padang Batung	Malutu	1	-	2
2		Malilingin	-	-	2
3		Batu Laki	1	-	3
4		Batu Bini	-	-	3
5		Pahampangan	-	-	1
6		Mawangi	1	-	2
7		Madang	1	-	2
Total			4	-	15

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2017

2.3.4 Sarana Ekonomi

Salah satu yang menjadi ukuran maju wilayah adalah tersedianya fasilitas perekonomian yang dapat mempermudah transaksi ekonomi masyarakat setiap saat, karena dengan semakin lengkapnya fasilitas ekonomi wilayah tentunya perekonomian daerah semakin cepat berkembang. Berdasarkan data potensi desa tahun 2016 untuk Kawasan Wisata Perdesaan ini diperoleh informasi bahwa sarana ekonomi yang paling banyak terdapat di kawasan tersebut adalah warung/ kedai makanan dan minuman dengan jumlah 54 unit. Berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan diketahui bahwa koperasi simpan pinjam tersebut belum berfungsi dengan semestinya.

2.3.5 Sarana Sosial Budaya

Sarana sosial budaya di kawasan perdesaan ini didominasi oleh keberadaan masjid dan musholla mengingat mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan tersebut menganut agama Islam. Masjid dan musholla di kawasan ini jumlahnya cukup banyak yaitu 14 masjid dan 21 musholla. Untuk lebih lengkapnya jumlah masjid dan musholla di setiap desa adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.10
Jumlah Sarana Sosial Budaya Menurut Desa
di Kawasan Wisata Perdesaan**

No	Kecamatan	Desa	Masjid	Langgar/Musholla
----	-----------	------	--------	------------------

1	Padang Batung	Malutu	2	1
2		Malilingin	3	1
3		Batu Laki	2	3
4		Batu Bini	3	5
5		Pahampangan	1	3
6		Mawangi	2	1
7		Madang	1	7
Total			14	21

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2017

2.3.6 Sarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintah di Kawasan Wisata Perdesaan mencakup antara lain adalah kantor desa berserta perlengkapannya, ruang BPD, ruang LPM dan ruang PKK yang sebagian besar sudah dimiliki oleh masing-masing desa. Selain sarana pendukung berupa kantor pemerintahan, pendukung kegiatan pemerintahan di setiap desa lainnya adalah keberadaan aparat pemerintahan desa. Jumlah aparat pemerintahan di desa-desa di Kawasan Wisata Perdesaan tahun 2016 ini berjumlah sebanyak -- orang yang terdiri dari KaDes, SekDes, Kaur Umum, Kaur Perencanaan & Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan & Pelayanan dan Ketua BPD. Tabel 2.11 menunjukkan distribusi aparat pemerintah desa di Kawasan Wisata Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.11
Jumlah Aparat Pemerintahan Desa-Desa yang di Sepakati Sebagai Kawasan Wisata Perdesaan

No	Kecamatan	Desa	KaDes	SekDes	Kaur		Kasi		Ketua BPD	Jumlah
					Umum	Peren & Keuangan	Pemerintahan	Kesejahteraan & Pelayanan		
1	Padang Batung	Malutu	1	1	1	1	1	1	1	7
2		Malilingin	1	1	-	1	1	1	1	6
3		Batu Laki	1	1	1	1	1	1	1	7
4		Batu Bini	1	1	1	1	1	1	1	7
5		Pahampangan	1	1	1	1	1	1	1	7
6		Mawangi	1	1	1	1	1	1	1	7
7		Madang	1	1	1	1	1	1	1	7
Total			7	7	6	7	7	7	7	7

Sumber: Data Aparat Desa Dinas PMD 2018

2.3.7 Sarana dan Prasarana Transportasi

Transportasi merupakan salah satu sarana prasarana yang penting dalam pengembangan suatu wilayah. Kemudahan akses dan tersedianya fasilitas transportasi menjadikan suatu wilayah dapat lebih berkembang dengan baik karena baik kegiatan ekonomi maupun informasi-informasi penting dapat berjalan dengan baik dan lebih mudah diakses oleh semua pihak. Kawasan Wisata Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini terletak di tengah kabupaten, dan memiliki jarak dengan ibukota Kabupaten sejauh lebih kurang 9 - 10 km. Aksesibilitas antar desa dalam kawasan, atau kawasan dengan kabupaten maupun provinsi dapat dijangkau dengan jalur transportasi darat. Sehingga moda transportasi darat seperti sepeda motor, mobil, bus, truk dan lain sebagainya dapat dijadikan moda transportasi di Kawasan Perdesaan tersebut. Untuk kondisi jalan, sebagian besar jalan yang berada di Kawasan Perdesaan maupun jalan yang menghubungkan antara kawasan perdesaan tersebut dengan ibukota kabupaten sudah dalam kondisi yang baik. Sebagian besar dari jalan tersebut sudah di aspal atau di beton sehingga memudahkan aksesibilitas dan lalu lintas masyarakat yang berada di Kawasan Wisata Perdesaan.

Tabel 2.12
Jarak (km) Desa-Desa dengan Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Jalur Transportasi yang digunakan

No	Kecamatan	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jalur Transportasi
1	Padang Batung	Malutu			Darat
2		Malilingin			Darat
3		Batu Laki			Darat
4		Batu Bini			Darat
5		Pahampangan			Darat
6		Mawangi			Darat
7		Madang			Darat

Sumber: BPS Kab. HSS, Kecamatan Padang Batung Dalam Angka 2017

2.3.8 Sarana dan Prasarana Energi

Kebutuhan sumber daya energi di Kawasan Wisata Perdesaan dirasa sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan tersebut. Hal tersebut didukung dengan adanya sarana berupa kantor PLN yang bergerak dalam penyediaan listrik daerah sehingga semua desa dalam kawasan sudah teraliri listrik walaupun masih terdapat beberapa rumah tangga yang belum berlangganan sehingga belum teraliri listrik. Sementara itu, bagi rumahtangga yang belum berlangganan listrik juga masih dapat menikmati listrik dari lampu penerangan jalan karena penerangan jalan berasal dari listrik yang diusahakan oleh pemerintah.

2.3.9 Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi

Kebutuhan jaringan teknologi dan telekomunikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyaknya fasilitas yang dapat digunakan menjadikan alasan mengapa telepon, internet dan sarana telekomunikasi dan informatika yang lain sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Dalam era globalisasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat pengguna jasa pos, telekomunikasi, multimedia, dan informatika, tidak saja akan memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga mewujudkan daya saing daerah. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, multimedia, dan informatika saat ini sudah banyak mengalami kemajuan. Telepon kabel dan telepon selular banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi.

Berdasarkan data potensi desa tahun 2014 Kawasan Wisata Perdesaan tercatat sudah memiliki jaringan dan sinyal telekomunikasi yang cukup baik sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perdesaan tersebut sudah bisa memanfaatkan telepon seluler. Selain itu untuk jaringan internet sendiri sudah tersedia walaupun keterjangkauannya belum merata sehingga masih ada beberapa titik yang tidak terjangkau jaringan internet.

2.3.10 Sarana dan Prasarana Air Bersih

Rumah tangga yang bertempat tinggal di Kawasan Wisata Perdesaan memanfaatkan air bersih yang bersumber dari aliran PDAM, sumur galian, sumur pompa dan air sungai untuk keperluan minum, memasak, mandi, atau mencuci. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sarana prasarana penjunjang air bersih di Kawasan Wisata Perdesaan sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

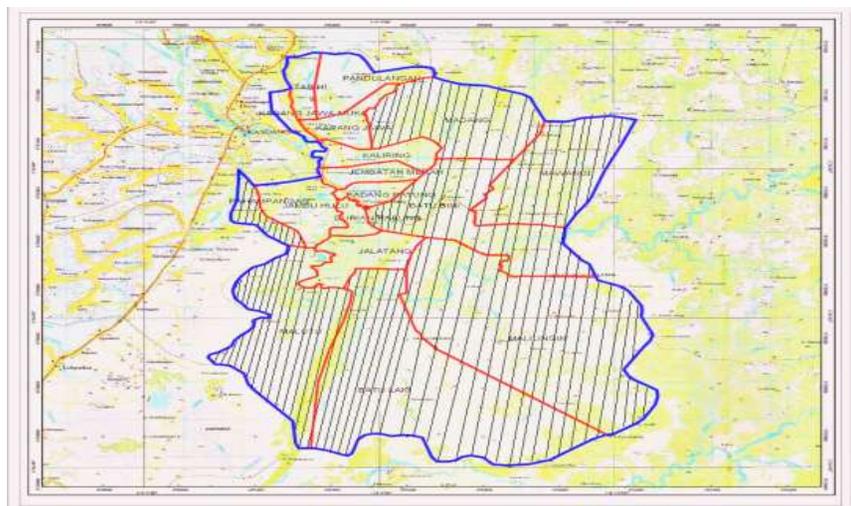
BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN

3.1 Delineasi Kawasan

Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batungyang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ini terdiri dari 7 (tujuh) desa yaitu Desa Malutu, Desa Malilingin, Desa Batu Laki, Desa Batu Bini, Desa Pahampangan, Desa Mawangi dan Desa Madang. Ketujuh desa tersebut termasuk dalam Kecamatan Padang Batung. Jumlah desa yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan tersebut telah disepakati bersama dengan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan secara lebih jelas dapat terlihat pada gambar 3.1.

Selain itu bersama TKPKP Kabupaten juga disepakati mengenai tema Kawasan Perdesaan yaitu Kawasan Wisata Perdesaan. Pemilihan tema ini ditentukan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di kawasan tersebut. Sebelumnya desa-desa yang tergabung dalam Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung ini memang sudah berkembang menjadi desa wisata.

Delineasi Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini ditetapkan berdasarkan batas administratif desa. Hal ini disebabkan karena bahwa semua desa-desa tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu sebagai sentra kawasan wisata perdesaandi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, pusat kegiatan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung disepakati berada di Desa Madang, alasan penetapan tersebut antara lain adalah letak desa yang strategis berada di tengah-tengah kawasan sehingga memudahkan apabila akan dilakukan kegiatan koordinasi antar desa, dan juga Desa Madang juga sudah memiliki embrio pasar.



Gambar 3.1
Peta Delineasi Kawasan Wisata Perdesaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2018

3.2 Susunan Fungsi Kawasan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pendekatan partisipatif ini merupakan salah satu kunci pembangunan kawasan perdesaan dapat berhasil.

Dalam menentukan lokus kawasan perdesaan, diarahkan pada kawasan yang sudah ditetapkan menjadi lokus prioritas yang bersumber dari :

- i) 39 Pusat Pertumbuhan Baru (keterkaitan Kota Desa) yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019;
- ii) Kawasan Perdesaan yang telah diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga (P2KPB, PKPBM, KTM, Agropolitan, Minapolitan, dll) atau Kawasan Perdesaan Tertentu, dan
- iii) Kawasan Perdesaan yang diusulkan Pemerintah Daerah.

Isu strategis Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperoleh dari hasil analisis potensi dan masalah yang ada di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa kegiatan pertanian masih berjalan cukup baik di kawasan tersebut sehingga didalamnya terdapat beberapa potensi dan masalah yang terkait dengan sektor pertanian. Namun, isu strategis yang akan dianalisis dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan ini akan disesuaikan tema kawasan perdesaan yang telah disepakati sebelumnya. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa tema kawasan perdesaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini adalah kawasan wisata perdesaan sehingga isu strategis yang ada akan dianalisis berdasarkan potensi dan permasalahan di bidang wisata. Berdasarkan potensi dan permasalahan di bidang wisata perdesaan, maka isu strategis di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung, salah satu kunci keberhasilan berkembangnya suatu kawasan perdesaan industri adalah adanya keinginan dan tingginya daya saing dari para pelaku usaha di bidang tersebut. Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki berbagai macam jenis objek wisata. Hal tersebut menjadi salah satu potensi sebuah kawasan perdesaan industri untuk dapat berkembang

menjadi lebih besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, pada kenyataannya Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini masih merupakan kawasan industri yang berskala kecil atau rumah tangga, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya motivasi dan daya saing para pelaku usaha untuk maju dan memajukan usahanya agar lebih berkembang. Hal tersebut juga berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing produk kawasan wisata perdesaanyang ada. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah setempat maka perkembangan kawasan wisata perdesaan khususnya di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung ini akan sulit berkembang menjadi industri dengan skala yang lebih besar dan kurang mampu bersaing dengan objek wisata dari daerah lainnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah mengadakan kegiatan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengadakan tenaga pendamping di bidang kawasan wisata perdesaan serta membentuk kelompok kerja bagi para pelaku di kawasan perdesaan. Tenaga pendamping industri ini berfungsi untuk mendampingi dan memberikan pelatihan serta sosialisasi terkait dengan peningkatan motivasi, kapasitas dan daya saing pelaku industri agar lebih meningkatkan kualitas diri dan usaha yang dilakukannya serta berdaya saing untuk memajukan kawasan wisata perdesaanyang ada di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung pada khususnya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya. Peningkatan jumlah pelatihan dan pendampingan bagi peningkatan kualitas produk juga perlu dilakukan, oleh karena itu pembangunan balai pelatihan bagi kegiatan industri juga merupakan salah satu peningkatan kualitas dan daya saing produk kawasan wisata perdesaandi Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kawasan wisata perdesaandi Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan kawasan wisata perdesaan yang sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah berlangsung lama.

Kelembagan merupakan salah satu pondasi dasar dalam pembangunan suatu desa, daerah maupun kawasan. Terdapatnya sebuah kelembagaan yang baik dapat berdampak pada pembangunan yang lebih tertata dan berjalan dengan teratur. Seperti yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya beberapa permasalahan di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batungdi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini akan dapat lebih diminimalisir apabila terdapat lembaga kerja sama antar desa dan juga Badan Usaha Antar Desa (BUMADes) dalam kawasan yang mampu memberikan pelayanan dan mengatur kegiatan yang menunjang kawasan wisata perdesaan yang ada di kawasan perdesaan tersebut. Salah satu

fungsi terbentuknya kelembagaan dalam Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung adalah untuk memberikan informasi tentang objek wisata yang ada dalam kawasan. Walaupun demikian, hingga saat ini di Kawasan Wisata Perdesaan ini belum memiliki kelembagaan antar desa yang berfungsi seperti uraian diatas. Oleh karena itu, untuk pengembangan Kawasan Wisata Perdesaan, diharapkan kelembagaan antar desa ini dapat terbentuk sehingga semua kegiatan yang terkait dengan kawasan wisata perdesaan dapat dikoordinasikan bersama oleh para pelaku usaha untuk menciptakan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung yang berdaya saing dan berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk kawasan wisata perdesaan yang berasal dari daerah lainnya.

BAB IV KLAster DAN SASARAN

Pengertian klaster komoditas yaitu komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Sementara itu klaster pendukung berupa layanan di tingkat kawasan yang sebagian besar akan dikembangkan di pusat kawasan atau berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa dan antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya. Klaster komoditas dan klaster pendukung ditentukan berdasarkan tema kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah, peluang pasar, dan aspirasi masyarakat. Berikut klaster komoditas, klaster pendukung dan sasaran klaster di kawasan wisata perdesaan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Salah satu bagian dalam Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ini terdapat uraian mengenai penentuan klaster. Klaster tersebut terdiri atas klaster komoditas dan klaster pendukung.

4.1 Klaster Komoditas

Klaster komoditas di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ditentukan berdasarkan tema kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan aspirasi masyarakat yang menunjukkan peluang pasar untuk mengembangkan komoditas unggulan.

4.2 Klaster Pendukung

Klaster pendukung berupa sektor pendukung dan penyediaan layanan di tingkat kawasan yang sebagian besar akan di kembangkan di pusat kawasan atau berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa dan antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya serta infrastruktur dasar yang dapat mendukung perkembangan Kawasan Wisata Perdesaan. Tabel 4.1 menunjukkan sasaran klaster yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun dari setiap klaster komoditas dan klaster pendukung yang ada di Kawasan Wisata Perdesaan Kecamatan Padang Batung.

Tabel 4.1
Klaster Komoditas, Klaster Pendukung dan Sasaran Klaster
Kawasan Wisata Perdesaan

No	Klaster	Sasaran Klaster (Dicapai dalam Waktu Lima Tahun)
1.	Wisata Padang Batung	Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata dalam kawasan perdesaan
		Pengembangan pariwisata baik sarana prasarana pendukung yang ada di lokasi kawasan
		Peningkatakan promosi tentang kawasan wisata yang ada di Padang Batung
		Pemanfaatan internet dalam kegiatan promosi wisata Padang Batung
		Tersedianya sarana prasarana penunjang seperti pos informasi lokasi wisata dan tugu atau batas masuk wilayah kawasan wisata perdesaan
2.	Pendukung Pertanian dalam arti luas	Peningkatan hasil pertanian yang digunakan sebagai penopang di kawasan perdesaan
3.	Pendukung lainnya	Tersedianya layanan pendukung dalam bentuk : a. Jalan b. Listrik dan Air Bersih c. Jaringan telekomunikasi dan Informasi d. Pasar Kawasan e. Warung Makan/ Kuliner khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan f. Bumdesa Bersama

Sumber: Focus Group Discussion (FGD) dan Survei Lapangan, 2018

Sesuai dengan tema kawasan perdesaan yaitu Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki klaster komoditas yaitu kawasan wisata. Kawasan wisata yang sudah berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga saat ini hanya beberapa yang sudah dicoba dikelola desa maupun kelompok masyarakat.

Selain klaster komoditas yang ada di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung, terdapat juga klaster pendukung yang berfungsi untuk mendukung perkembangan klaster komoditas. Dalam Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini klaster pendukung yang pertama adalah sektor pertanian dalam arti luas. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pengembangan perekonomian di suatu wilayah. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sektor pertanian juga masih menjadi sektor yang berpengaruh dalam perkembangan perekonomian wilayah maupun kontribusi terhadap PDRB. Komoditas unggulan yang banyak diusahakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pertanian tanaman pangan, terutama padi sawah. Selain itu untuk Kawasan Wisata Perdesaan sektor pertanian juga masih menjadi sektor yang memiliki peran besar. Jenis komoditas yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat yang ada di kawasan perdesaan antara lain adalah

padi baik sawah maupun padi ladang, kacang tanah, jagung dan ubi jalar maupun ubi kayu. Klaster pendukung lainnya yang berfungsi untuk mendukung perkembangan klaster komoditas di Kawasan Wisata Perdesaan merupakan infrastruktur sarana prasarana penunjang kegiatan wisata perdesaan yang dibagi menjadi :

a. Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian sehingga hal ini yang menyebabkan bahwa jalan menjadi pendukung utama dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di kawasan perdesaan. Jalan di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini terlihat belum cukup memadai, karena kondisinya banyak yang belum terhubung dan belum dilakukan perkerasan. Sehingga kondisi lalu lintas masyarakat di dalam kawasan atau menuju lokasi wisata belum dapat berjalan dengan cukup lancar.

b. Listrik dan Air Bersih

Listrik merupakan salah satu pendukung di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengingat listrik juga menjadi faktor dalam memperlancar kegiatan sehari-hari. Listrik di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai ini sudah dialiri listrik PLN. Walaupun demikian ada beberapa rumah tangga yang tidak berlangganan listrik dan lebih memilih menggunakan sumber listrik pribadi seperti genset. Dan untuk air bersih, penyediaan air bersih di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung ini sebagian besar berasal dari sumur galian dan sumur bor, walaupun demikian ada banyak rumah tangga yang sudah memanfaatkan dan berlangganan air ledeng dari PDAM. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa untuk ketersediaan listrik dan air bersih di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung ini sudah cukup memadai dan sudah dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

c. Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Jaringan telekomunikasi dan informasi saat ini menjadi sangat penting dan menjadi salah satu dari sarana pendukung bagi Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kebutuhan akan akses internet dan telpon dewasa ini sangat tinggi sekali, baik untuk menyambung komunikasi serta mencari informasi, artikel, pengetahuan terbaru, dan juga hiburan. Bahkan telepon dan internet dari sebelumnya merupakan kebutuhan tambahan tetapi sekarang telah menjadi kebutuhan penting seiring dengan jalannya waktu di mana hampir setiap hari masyarakat menggunakannya. Dalam

era globalisasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat pengguna jasa pos, telekomunikasi, multimedia, dan informatika, tidak saja akan memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga mewujudkan daya saing daerah. Dan jaringan telekomunikasi di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung sendiri ada beberapa yang sudah cukup baik karena sinyal telepon dan internet sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, tapi ada beberapa yang masih lokasi yang belum bisa mengakses jaringan internet.

d. Pasar Kawasan

Pasar merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan ekonomi, dalam Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung fungsi pasar menjadi cukup penting sebagai tempat untuk memasarkan hasil pertanian yang ada di kawasan perdesaan tersebut. Namun, di dalam Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung belum terdapat pasar yang mengakomodasi kegiatan ekonomi tersebut. Pasar terdekat berada di luar kawasan perdesaan yaitu di Kecamatan Padang Batung yang berjarak lebih kurang 6 Km dari Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung.

e. Warung Makan/ Kuliner khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sama halnya dengan pasar, sarana pendukung lainnya dari kawasan wisata padang batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah warung makan. Selain dikenal memiliki produk makanan ringan yang khas yaitu dodol kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki makanan khas yang sudah dikenal oleh banyak orang yaitu ketupat kandangan ikan haruan. Oleh karena itu, di sepanjang jalan utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan banyak ditemui warung makan ketupat kandangan tersebut. Keberadaan warung makan tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri untuk menitipkan hasil produksinya untuk dijualkan kepada konsumen yang datang.

Sentra kuliner dan oleh-oleh khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu usulan program pembangunan yang di usulkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung rencana pembangunan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung. Apabila sentra kuliner dan oleh-oleh tersebut tersedia maka dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha dibidang kuliner maupun makanan ringan agar kegiatannya dapat terakomodasi. Dengan adanya sentra kuliner dan oleh-oleh khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diharapkan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung juga dapat lebih berkembang dan meningkat skala industrinya serta kualitas produk yang dihasilkan. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kawasan Wisata

Perdesaan Padang Batung pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya.

f. Bumdesa Bersama

Bumdesa Bersama pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, sedangkan Bumdesa berada di tingkat desa. Bumdesa Bersama ini juga merupakan sarana pengembangan potensi kawasan perdesaan, sehingga lembaga Bumdesa Bersama dirasa sangat diperlukan sebagai komoditas pendukung di suatu kawasan perdesaan. Namun, apabila dilihat berdasarkan kondisi di lapangan dapat diketahui bahwa di Kawasan wisata perdesaan ini belum memiliki Bumdesa atau bahkan Bumdesa Bersama sama sekali sehingga hal ini sangat diperlukan dalam pembentukan lembaga Bumdesa Bersama.

BAB V

MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN

Arti kata sinergisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kegiatan yang tergabung dan memiliki pengaruh yang lebih besar (memiliki efek ganda) dibandingkan dengan jumlah total pengaruh masing-masing atau satu per satu kegiatan yang berdiri sendiri. Dalam analisis sinergisme sendiri terdapat beberapa komponen pendukung yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), produk, modal, infrastruktur, lembaga dan juga pasar. Untuk Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat potensi sumber daya manusia yang memenuhi dan memiliki ketrampilan di bidang pertanian.

Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan modal usaha yang dimiliki oleh masing-masing pengusaha dan hal tersebut tentu saja berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil produk yang dihasilkan. Sinergisme memiliki makna menyatukan energi agar terbentuk kekuatan baru yang pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Energi di sini dimaksudkan sebagai komponen kegiatan dan program yang dapat menghasilkan sistem yang lebih kompleks menuju suatu tujuan tertentu. Di kawasan perdesaan hulu sungai selatan yang menggunakan tema wisata, sinergisme utama yang ditonjolkan yaitu sistem wisata yang terpadu yang diharapkan yaitu bersifat produktif dan berkelanjutan.

Komponen kedua dalam analisis sinergisme adalah ke-khas-an wisata yang ditonjolkan, di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung ini memiliki bermacam-macam jenis antara lain adalah wisata air terjun, wisata air panas, wisata gunung, wisata goa, wisata susur sungai, wisata buatan cekdam. Kelembagaan desa berfungsi sebagai wadah usaha bersama milik masyarakat desa, untuk Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung ini diperlukan pembentukan lembaga koordinasi antar desa yang berfungsi untuk mengatur manajemen pengadaan penyertaan modal, penguatan jaringan promosi dan pasar juga sebagai wadah koordinasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan kawasan wisata perdesaan padang batung. Namun, saat ini kondisi di lapangan menunjukkan bahwa di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung belum memiliki lembaga koordinasi antar desa tersebut, bahkan setiap desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan juga belum memiliki lembaga atau badan tersendiri yang bertanggungjawab terhadap perkembangan wisata perdesaan yang ada. Sama halnya dengan lembaga koordinasi antar desa, di dalam Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini juga belum memiliki pasar desa maupun pasar bersama dalam kawasan perdesaan. Pasar terdekat terletak pada kecamatan lain, yaitu Kecamatan Padang Batung yang berjarak kurang lebih 6 Km dari kawasan

perdesaan. Dengan adanya keberadaan pasar diharapkan hasil pertanian bisa dipasarkan.

Hubungan sinergisme dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan lima tahun ke depan dapat dianalisis berdasarkan isu strategis yang diangkat dari potensi dan masalah di wilayah tersebut. Untuk mewujudkan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung, komponen-komponen sinergisme tersebut harus disinergikan dengan komoditas dan pendukung industri lainnya. Skema dibawah ini merupakan skema sinergisme yang diharapkan dapat diterapkan di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung.

Ketika upaya meningkatkan daya saing dan produk melalui peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata serta penguatan promosi telah dilakukan, maka sinergisme sudah tercipta dari komponen tersebut, sehingga untuk mendukung analisis sinergisme selanjutnya adalah perbaikan dan pengembangan infrastruktur pendukung yaitu jalan, listrik dan air bersih. Kondisi jalan yang ada di Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung pada dasarnya sudah cukup memadai dan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, hanya saja apabila yang ada di kawasan perdesaan tersebut berkembang maka diperlukan perbaikan dan pelebaran jalan serta penambahan lampu penerangan jalan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar. Selain itu agar sinergisme Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung dapat terwujud maka diperlukan sebuah studi tentang pengembangan kawasan wisata perdesaan. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan hasil pertanian yang ada di dalam Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung maupun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Apabila daya saing dan produk melalui peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata sudah dapat ditingkatkan bersamaan dengan terbentuknya dan berjalannya fungsi Badan Usaha Antar Desa Bersama dan pengembangan infrastruktur pendukung sudah terlaksana maka selanjutnya diharapkan terjadi sinergi yang baru yang akan membantu peningkatan infrastruktur yang ada di kawasan perdesaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk penguatan kelompok sadar wisata dan kerjasama dengan pihak lain adalah dengan pengembangan website kawasan sebagai salah satu sarana atau media promosi bagi paket wisata yang ada, selain pengembangan website kawasan tersebut dapat juga dilakukan melalui kegiatan pengadaan papan informasi dan promosi di setiap titik penting seperti di Bandar Udara Syamsudin Noor, dan setiap persimpangan jalan nasional maupun titik penting lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu dengan terus meningkatnya kualitas produk dan berkembangnya pemasaran yang ada maka Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa Bersama) yang terbentuk melalui kesadaran masyarakat setempat dapat berjalan dengan baik sesuai fungsi yang

telah ditentukan sehingga perkembangan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung dapat terus maju dan lebih dikenal oleh masyarakat luas.

5.1 Analisis Kluster

No	Sub Sistem	Kegiatan/ Program yang sudah dilaksanakan		Isu strategis (Permasalahan), Kebutuhan, Komponen Terkait			Keterangan* (**)
		Komponen	Program / Kegiatan	Permasalahan yang masih ditemukan	Kebutuhan Kegiatan**)	Komponen Pelaksana**)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengembangan Sektor Promosi Kawasan Wisata Perdesaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perencanaan pembangunan jalan lingkungan antar desa	Masih belum ada rencana detail terkait dengan jalan antar desa dalam kawasan	Terencananya pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Baru
		Dinas Komunikasi dan Informasi	Pelatihan IT untuk promosi produk kawasan dan potensi yang ada Akses telekomunikasi	Masih belum ada rencana detail terkait dengan jalan antar desa dalam kawasan	Terencananya pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Program Baru
		Dinas Komunikasi dan Informasi	Pelatihan IT untuk promosi produk kawasan dan potensi yang ada	Belum memaksimalkan IT sebagai salah satu cara mempromosikan kawasan wisata	Semua pelaku yang ada di desa kawasan perdesaan dilakukan peningkatan kapasitas dalam bidang IT guna mengangakat potensi yang ada	Dinas Komunikasi dan Informasi	Program Baru
		Dinas Perhubungan	Pembangunan tugu/batas	Belum tersedia tugu atau batas	Dengan dibangunnya tugu/batas	Dinas Perhubungan	Program Baru

			masuk ke lokasi kawasan perdesaan	masuk kawasan wisata	masuk kawasan wisata perdesaan wisatawan akan lebih mudah untuk mengidentifikasi wisata yang ada		
	Dinas Perdagangan	Fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada (misalnya : anyaman bambu)	Belum termanfaatkan potensi sumber daya yang ada	Terealisasi	kannya pelatihan peningkatan bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada	Dinas Perdagangan	Program Baru
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Pelatihan peningkatan kapasitas UMKM	Pelatihan yang dilaksanakan UMKM dilakukan secara berkelanjutan	Belum ada pelatihan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian		Program Baru
	CSR AGM	Pembangunan sarana pendukung rest area atau pos pusat informasi tentang peta wisata	Belum ada informasi yang jelas terkait paket atau spot spot lokasi wisata yang ada dalam kawasan	Terbangun	nya rumah informasi/ rest area sebagai sarana pendukung untuk pos informasi tentang peta wisata	CSR AGM	Program Baru
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan Bumdes Bersama	Belum ada Bumdes Bersama yang mendukung	Kelembagaan ekonomi bumdesma harus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		Program Baru

		akat Desa		g kawasan perdesaan	terbentuk sebagai salah satu penopang keberadaa n kawasan wisata		
		Semua Desa dalam Kawasa n	Penguat an modal usaha Bumdes a Bersama	Belum ada modal usaha	Kelembaga an ekonomi bumdesma harus terbentuk sebagai salah satu penopang keberadaa n kawasan wisata	Semua Desa dalam Kawasa n	Progra m Baru
		Bappelit bangda, Dinas Pemuda , Olahrag a & Pariwis ata, Dinas PMD	Monitori ng dan Evaluasi	Beberapa OPD belum mendukun g program di kawasan wisata perdesaan	Terpantau nya perkembangan kawasan wisata	Badan Perenca naan Pemban gunan, Peneliti an dan Pengem bangan Daerah	Progra m Baru
		Dinas Peruma han Rakyat, Kawasa n Permuk iman dan Lingkun gan Hidup	Pemban gunan jalan lingkung an antar desa	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan	Pembangu nan jalan antar desa dalam kawasan	Dinas Peruma han Rakyat, Kawasa n Permuki man dan Lingkun gan Hidup	Progra m Baru
2	Pengemb angan Keteramp ilan untuk Meningka tkan Inovasi & Kreativita s Lokal	Dinas Pemuda , Olahrag a dan Pariwis ata	Pembent ukan dan pelatiha n Kelompo k Sadar Wisata (POKDA RWIS)	Belum ada Pokdarwis	Terbentuk nya Pokdarwis di Kawasan Wisata	Dinas Pemuda, Olahrag a dan Pariwisa ta	Progra m Lanjut an dan Baru
		Dinas Pember dayaan Masyar	Peningk atan Kapasita s Penguru	Belum ada Bumdesa Bersama yang mendukun	Pembentuk an Bumdesa Bersama	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat Desa	Progra m Baru

		akat Desa	s Bumdes a Bersama	g kawasan perdesaan			
		TKPKP	Studi Tiru Pengelol aan Kawasa n Wisata	Belum ada gambaran tentang pengemba ngan kawasan wisata	Bisa belajar dan menjadika n contoh untuk pengemba ngan kawasan wisata	TKPKP	Progra m Baru
3	Pengemb angan Kerjasa m Antar Desa	Dinas Pember dayaan Masyar akat Desa	Pembent ukan Bumdes a Bersama	Belum ada Bumdesa Bersama yang mendukun g kawasan perdesaan	Pembentuk an Bumdesa Bersama	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat Desa	Progra m Baru
		Semua Desa	Penguat an modal usaha Bumdes a Bersama	Belum ada modal usaha	Penguatan modal usaha Bumdesa Bersama	Semua Desa	Progra m Baru
4	Monitorin g dan Evaluasi Program	Bappelit bangda	Monitori ng dan Evaluasi	Terpantau nya perkemba ngan kawasan wisata	Monitoring dan Evaluasi	Bappelit bangda	Progra m Baru
		Dinas PMD	Monitori ng dan Evaluasi	Terpantau nya perkemba ngan kawasan wisata	Monitoring dan Evaluasi	Dinas PMD	Progra m Baru
		Dinas Pemuda , Olahrag a dan Pariwis ata	Monitori ng dan Evaluasi	Terpantau nya perkemba ngan kawasan wisata	Monitoring dan Evaluasi	Dinas Pemuda, Olahrag a dan Pariwisa ta	Progra m Baru

5.2 Kerangka Sistem

Pengarah Bupati HSS
Penanggungjawab Sekda Kab HSS

Ketua Tim Bappelitbangda
Sekretaris Tim
Assisten Administrasi Pembangunan & Kemasyarakatan

Klaster Kawasan Wisata Perdesaan
Koordinator
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sub Sistem Promosi
<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan• Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu• Dinas Perdagangan• Dinas Komunikasi dan Informatika• Bumdes Bersama

Sub Sistem Pertanian
<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pertanian• Dinas Ketahanan Pangan

Sub Sistem Sarana Prasarana
<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang• Dinas Perhubungan

Klaster Pendukung
<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Desa PDTT• Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil & Perindustrian• Perbankan• CSR

BAB VI
MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

Matriks Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah segala macam upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan perdesaan. Perumusan Program Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk 5 (lima) tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan. Rencana program Pembangunan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:

1. Pengembangan objek wisata
2. Peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata
3. Pengembangan promosi kawasan wisata padang batung
4. Pengembangan sentra industri kuliner Hulu Sungai Selatan
5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi di kawasan perdesaan

Perumusan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk 5 (lima) tahun ke depan ini merupakan penjabaran yang bersifat lebih mendalam dan operasional dari program yang telah dirumuskan. Rencana kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat melalui tabel yang sudah dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Perdesaan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Daya Saing objek wisata kawasan perdesaan	Peningkatan pelayanan di objek wisata kawasan perdesaan	Terfasilitasinya kelompok sadar wisata	Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui seminar, motivasi dan pelatihan penguatan daya saing pelaku	Pengembangan SDM	Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
		Terwujudnya pengembangan kawasan wisata perdesaan	Pengembangan hasil pertanian pendukung kawasan wisata	Mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pertanian pendukung kawasan wisata		Studi pengembangan agropolitan dalam kawasan perdesaan
Jaringan Promosi Kawasan Wisata Perdesaan	Meningkatkan Promosi	Tersedianya sarana promosi	Pembangunan dan peningkatan sarana pemasaran produk	Membangun dan menyediakan sarana pemasaran produk berupa pasar bersama dan papan promosi	Pengembangan Promosi Kawasan Wisata Perdesaan	Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata
		Teraplikasinya teknologi pendukung promosi kawasan wisata perdesaan	Pengadaan alat dan sistem teknologi promosi kawasan wisata	Meningkatkan pengaplikasian sistem teknologi pemasaran melalui pengembangan website kawasan		Penyediaan papan informasi dan promosi yang dapat diakses masyarakat
		Terbangunnya sentra kuliner dan oleh-oleh	Pembangunan sentra oleh-oleh dan kuliner	Membangun dan menyediakan sarana pemasaran produk berupa sentra oleh-oleh dan kuliner khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Pengembangan website untuk promosi kawasan wisata perdesaan
						Pembangunan sentra oleh-oleh produk khas Kab.HSS Penyediaan perlengkapan pendukung sentra oleh-oleh

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Kelembagaan Sosial Ekonomi Kawasan Perdesaan	Membentuk kelembagaan sosial ekonomi di kawasan perdesaan	Terbangunnya kelembagaan sosial ekonomi di kawasan perdesaan	Peningkatan kerjasama dan koordinasi	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pelaku industri melalui kegiatan diskusi atau musyawarah	Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Kawasan Perdesaan	Membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama
			Penguatan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan serta aliansi dengan pihak lain		

Sumber: Hasil Analisis, 2018

6.2 Indikator Capaian Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan

Indikator capaian kegiatan merupakan rangkaian rumusan yang menjadi standar baku untuk digunakan dalam menilai kegiatan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, indikator capaian kegiatan ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan.

Kebutuhan pendanaan adalah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program dan kegiatan. Sumber pendanaan ini dapat berasal dari beberapa sumber seperti Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat, maupun kerjasama dengan pihak lain. Untuk indikator capaian kegiatan dan kebutuhan pendanaan termuat dalam matrik kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.2
Matrik Kegiatan (Program) Pembangunan Kawasan Perdesaan

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
	Komponen *)	Kegiatan **)														Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5				1	2	3	4	5		
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pembentukan dan pelatihan Kelompok Sadar Wisata (POKDA RWIS)	Desa Kawasan	1					Paket	Kawasan						APBD	Terbentuknya Pokdarwis di Kawasan Wisata	Belum ada Pokdarwis	1					Desa dalam kawasan perdesaan yang ada sudah terbentuk pokdarwis dan terlatih
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan	Perencanaan pembangunan jalan lingkungan antar desa	Antar Desa dalam Kawasan	1		1			Paket	50			50			APBD	Terencanakan pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada rencana detail terkat dengan jalan antar desa	1		1			Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
																		1	2	3	4	5	
	gan Hidup														dalam kawasan							yang baik	
3	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pelatihan IT untuk promosi produk kawasan dan potensi yang ada Akses telekomunikasi	Desa Kawasan	1		1			Paket	20		10			APBD	Semua pelaku yang ada di desa kawasan perdesaan dilakukan peningkatan kapasitas dalam bidang IT guna mengangkat	Belum memaksimalkan IT sebagai salah satu cara mempromosikan kawasan wisata	1		1			Desa kawasan mempunyai potensi dan produk unggulan yang harus dipublikasikan mengikuti kemajuan zaman lewat

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
	Komponen *)	Kegiatan **)														Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5				1	2	3	4	5		
																potensi yang ada								dunia maya

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
																		1	2	3	4	5	
4	Dinas Perhubungan	Pembangunan tugu/batas masuk ke lokasi kawasan perdesaan	Desa Batu Bini, Desa Pahampangan, Desa Madang	1			1		Paket	20			20		APBD	Dengan dibangunnya tugu/batas masuk kawasan wisata perdesaan wisatawan akan lebih mudah untuk menidentifikasi wisata yang ada	Belum tersedia tugu atau batas masuk kawasan wisata	1			1		Dibangunnya tugu/batas masuk kawasan didesa pertama akses masuk kawasan yaitu di Desa Pahampangan dan Desa Batu Bini

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
	1	2																3	4	5				
5	Dinas Perdagangan	Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada (misalnya : anyaman bambu)	Desa Kawasan		1			1	Paket		20			15	APBD	Terealisasi pelatihan peningkatan bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada	Belum memanfaatkan potensi sumber daya yang ada		1				1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam
6	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Pelatihan peningkatan kapasitas UMKM	Desa Kawasan	1		1			Paket	30		30			APBD	Pelatihan yang dilaksanakan UMKM dilakukan secara berkelanjutan	Belum ada pelatihan	1		1			UMKM desa dalam kawasan yang ada terdiri dari sudah diikuti dalam pelatihan	

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
																		1	2	3	4	5		
7	CSR AGM	Pembangunan sarana pendudukan rest area atau pusat informasi tentang peta wisata	Desa Batu Bini, Desa Pahampangan	1					Paket		30			30	APBD	Terbang unnya rumah informasi/ rest area sebagai sarana pendudukan untuk pos informasi tentang peta wisata	Belum ada infomasi yang jelas terkait paket atau spot lokasi wisata yang ada dalam kawasan		1				1	Informasi mengenai paket atau spot lokasi wisata lebih mudah ditemukan di pintu masuk kawasan wisata

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
																		1	2	3	4	5		
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembentukan Bumdesa Bersama	Desa Madang	1					Bumdesma	15					APBD	Kelembagaan ekonomi bumdesma harus terbentuk sebagai salah satu penopang keberadaan kawasan wisata	Belum ada Bumdesa Bersama yang mendukung kawasan perdesaan	1						Terbentuknya Bumdesa Bersama

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
																		1	2	3	4	5	
9	Semua Desa	Penguatan modal usaha Bumdesa Bersama	Semua Desa	1	1				Bumdesma	25	25				APB Desa	Kelembagaan ekonomi bumdesma harus terbentuk sebagai salah satu penopang keberadaan kawasan wisata	Belum ada modal usaha	1	1				Tersedianya modal usaha Bumdesa Bersama
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Monitoring dan Evaluasi	Kawasan	1	1	1	1	1	Kegiatan	10	10	10	10	10	APBD Kab	Terpantanya perkembangan kawasan wisata	Beberapa OPD belum mendukung program di kawasan wisata	1	1	1	1	1	OPD dapat komitmen mendukung program kawasan yang sudah ada di

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
																		1	2	3	4	5	
															perdesaan							matrik kegiatan kawasaan	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Monitoring dan Evaluasi	Kawasaan	1	1	1	1	1	Kegiatan	7	7	7	7	7	APBD Kab	Terpantunya perkembangan kawasan wisata	Pendampingan terhadap bumdesa bersama belum optimal						Dapat memfasilitasi membuka jaringan kerjasama Bumdesa Bersama dengan Pihak ketiga

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
																		1	2	3	4	5	
12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi	Kawasan	1	1	1	1	1	Kegiatan	7	7	7	7	7	APBD Kab	Terpantunya perkembangan kawasan wisata	Pendampingan belum intensif terhadap kawasan wisata perdesaan						Dapat memberikan pendampingan yang rutin dikawasan wisata perdesaan
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan	Monitoring dan Evaluasi	Kawasan			1	1	1	Kegiatan	7	7	7	7	7	APBD Prov	Terpantunya perkembangan kawasan wisata	Pendampingan terhadap bumdesa bersama belum optimal						OPD dapat komitmen mendukung program kawasan yang sudah ada di matrik kegiatan kawasan

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
																		1	2	3	4	5	
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pembangunan jalan lingkungan antar desa	Antar Desa dalam Kawasan		1		1	1	Paket		100		100	100	APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan		1		1	1	Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik
15	Dinas Perkim & LH	Jalan akses masuk ke puncak batu bini wisata Gua Singa	Desa Batu Bini		1				Paket		200				APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan		1				Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
																		1	2	3	4	5		
16	Kemendesa PDTT	Sapras penduku wisata air (Balanti ng)	Desa Batu Bini, Desa Batu Laki dan Malutu, Mawang i		1				Paket		350				APBN	Menambah daya tarik wisata dan nilai tambah untuk pengunjung	Belum ada sarana prasarana pendukung dilokasi ini		1					Tersedia sarana prasarana pendukung di lokasi ini
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jalan, Jembatan & Sapras penduduk wisata Air Panas	Desa Batu Bini			1			Paket			300			APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan			1				Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
																		1	2	3	4	5	
18	Kemendesa PDTT	Jalan, Tangga menuju, sapras penduduk, Wisata Alam Gunung Palawan	Desa Mawangi			1			Paket			350			APBN	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan			1			Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik
19	CSR AGM	Sarana Prasarana Pendukung Wisata Alam Gunung Payung	Desa Mawangi		1				Paket		200				CSR	Menambah daya tarik wisata dan nilai tambah untuk pengunjung	Belum ada sarana prasarana pendukung di lokasi ini		1				Tersedia sarana prasarana pendukung di lokasi ini

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
																		1	2	3	4	5		
20	CSR AGM	Sarana Prasarana Pendukung Wisata Gunung Halinjua ngan	Desa Mawang i			1						200			CSR	Menambah daya tarik wisata dan nilai tambah untuk pengunjung	Belum ada sarana prasarana pendukung dilokasi ini				1			Tersedia nya sarana prasarana pendukung di lokasi ini
21	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Gunung Batu Balai	Desa Madang, Desa Mawang i				1		Paket				250		APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan					1		Desa dalam kawasa n yang ada sudah mampu nyai akses jalan yang baik

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
	1	2																3	4	5				
22	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Rehab Jembatan gantung ke Wisata Air Panas	Desa Malilingin					1	Paket					100	APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan						1	Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik
23	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Pembangunan jembatan gantung	RT 3 Desa Malilingin		1				Paket		100				APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan		1					Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
																		1	2	3	4	5		
24	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Akses jalan masuk ke Wisata Air Panas	Desa Malilingin			1			Paket			100			APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan			1				Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik
25	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Prov Kalimantan Selatan	Akses Jalan Air Terjun Gantungan Iwak & Air Terjun Gantungan Saluang	Desa Malilingin		1				Paket		1				APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan		1					Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
	1	2																3	4	5			
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan	Akses Jalan & Jembatan ke lokasi Gunung Kudai	Desa Batu Laki			1			Paket			300			APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan			1			Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan	Sapras Pendukung Wisata Gua Berangin (Gn Batu Laki)	Desa Malutu, Batu Laki			1			Paket			350			APBD	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan			1			Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
																		1	2	3	4	5	
28	Kemendesa PDDT	Air Terjun Riam Menangs dll	Desa Batu Laki			1			Paket			1			APBN	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa dalam kawasan			1			Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai akses jalan yang baik
29	TKPKP	Studi Tiru Pengelolaan Kawasan Wisata	Semua TKPKP	1					Paket						APBD, APBD desa, CSR	Bisa belajar dan menjadi contoh untuk pengembangan kawasan wisata	Belum ada gambaran tentang pengembangan kawasan wisata	1					Desa yang termasuk dalam kawasan sudah memahami dan bisa membuat rencana kerja tentang pengembangan kawasan

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja								
	Komponen *)	Kegiatan **)		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)	
																		1	2	3	4	5		
																							dengan objek tersebut	
31	Dinas Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Akses telekomunikasi	Semua Desa Kawasan		1	1			Paket		100	100			APBD	Peningkatan akses komunikasi	Beberapa titik belum bisa akses internet		1	1				Semua desa dalam kawasan dan lokasi objek kawasan wisata sudah bisa mengakses internet
32	CSR AGM	Akses ke lokasi wisata Gunung Layang2	Desa Pahampangan ke Desa Malutu		1				Paket		100				CSR	Pembangunan jalan antar desa dalam kawasan	Masih belum ada akses jalan antar desa		1					Desa dalam kawasan yang ada sudah mempunyai

No	Program		Lokasi	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Desa ***) Tahun Ke- (juta rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja							
	Komponen *)	Kegiatan **)														Indikator Program *8)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5				1	2	3	4	5	
																dalam kawasan						akses jalan yang baik	

*Tahun dimulai 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY